

DAFTAR REFRENSI

- Aurihan, E. 2022. Perizinan Pemanfaatan Ruang (Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang). Jakarta: LAPATARU.
- Basah, S. 1992. Hukum perizinan di Indonesia. Hlm Soehino, asas-asas hukum tata pemerintahan, Yogyakarta 1984.
- Hadjon, P. M., Martosoewignjo, S. S., & Basah, S. 2005. Pengantar Hukum Administrasi Indonesia.
- Hamidi. 2004. Metode Penelitian Kualitatif: Aplikasi Praktis Pembuatan Proposal dan Laporan Penelitian. Malang: UMM Press.
- Hariwijaya, dan Triton. 2008. Pedoman Penulisan Ilmiah Proposal dan Skripsi. Yogyakarta: Tugu Publisier.
- Jannah, A. N. B., Hidayat, M. N., & Husain, M. A. 2022. Sosialisasi Kebijakan Pemerintah Tentang Perizinan UMKM Guna Meningkatkan Kesadaran Akan Pentingnya Perizinan Usaha. *Eba Journal: Journal Economic, Bussines Dan Accounting*, 1(1), 11-17.
- Jauhari, 2011, Hukum Perizinan, Medan, Hlm 11-20 Dalam Konsep Hukum Perizinan Dan Pembangunan, Rifqy Maulana Dan Jamhir
- Kodoatie, Robert J. 2005. Pengantar Manajemen Infrastruktur. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Malingreau, dan Rosalia. 1979. *Land Use/Land Cover Classification in Indonesia*. Yogyakarta: Fakultas Geografi UGM
- Miles, Matthew B. dan Huberman, Michael A. 1992. Analisis Data Kualitatif. Jakarta: UI Press.
- Moleong. 2004. Metodologi Penelitian
- Nurhayati, H. (2020, Desember). Pengaruh Persyaratan Perizinan, Prosedur Perizinan Dan Konsekuensi Perizinan Terhadap Perkembangan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM) Di Kabupaten Sukabumi. In SEMNASTERA (Seminar Nasional Teknologi Dan Riset Terapan) (Vol. 2, Pp. 319-328).
- Parera, Z., & Saleng, A. (2021). Mekanisme Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Bagi Pembangunan Perumahan. *Batulis Civil Law Review*, 2(2), 152-165.
- Puspita, V., & Tan, D. 2021, April. Pendampingan Pengajuan Perizinan Berusaha Sektor Umkm "Cimami Jagonya Snack" Pada Lembaga *Online Single Submission*. In *ConCEPT-Conference on Community Engagement Project* (Vol. 1, No. 1, pp. 255-262).
- Redi, A., Marfungah, L., Fansuri, R. F., Prawira, M., & Lafentia, A. 2022. Perizinan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMKM): Bentuk Pemberdayaan, Perlindungan Hukum Dan Mewujudkan Negara Kesejahteraan. *Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni*, 6(1), 282-292.

- Ridwan, I. H. J., & Sudrajat, M. A. S. 2020. Hukum administrasi Negara dan kebijakan pelayanan publik. Nuansa Cendekia.
- Sevilla. 1960. Pengantar Metode Penelitian. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Soeparsono. 2000. Sarana dan Prasarana Olahraga. Depdikbud.
- Sugiarto, E. 2017. Menyusun proposal penelitian kualitatif: Skripsi dan tesis: Suaka media. Diandra Kreatif.
- Sugiyono. 2013. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.CV
- Sugiyono. 2016. Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta.
- Sukmarini, H. 2021. Analisis Kesesuaian Rencana Pemanfaatan Ruang Perkotaan Dengan Pola Penggunaan Lahan (Studi Kasus Kecamatan Jati Asih). Jurnal Ilmiah Planokrisna, 17(1).
- Sutedi, A. 2015. Hukum perizinan dalam sektor pelayanan publik. Sinar Grafika.
- Utrecht, E. 1957. Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia, cetakan ke empat.
- Wibowo, R. I. 2021. Perbandingan Perizinan UMKM Sebelum dan Sesudah Adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Perspektif Mashlahah (*Doctoral dissertation*, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim).
- Winartha, I. M. 2006, Pedoman Penulisan Usulan Penelitian Skripsi.
- Yusuf, A. A., Suganda, T., Hermanto, Mansur, F., & Hadisoemarto, P. 2020. Strategi Ekonomi Sektor Pertanian di Tengah Pandemi Covid-19. Universitas Padjajaran.

Kebijakan

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
- Peraturan Pemerintah No. 21 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman.
- Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Izin Gangguan.
- Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tangerang Selatan Tahun 2011 – 2031.

Website

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Dinas Koperasi usaha Kecil dan Menengah <https://e-sakip.tangerangselatankota.go.id/assets/UPLOAD/lkt/603a140ad0bbf-LKT-2020.pdf>

Sosialisasi Kebijakan Penataan Ruang PP No. 21 Tahun 2021 <https://tataruang.atrbpn.go.id/Images/Uploads/New/Dokumen/2021/Maret/Pengumuman/Bahan%20Paparan%20Pak%20Dirjen%20Tata%20Ruang%20Sosialisasi%20PP%202021%202021.pdf>